

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan di BNP dan BNK/Kota.

5.1 HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan karakteristik responden yang terdiri dari responden BNP dan BNK/Kota. Disamping itu juga akan dijelaskan tentang variabel penelitian yaitu implementasi kebijakan strategi nasional P4GN yang meliputi tentang komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi dan pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota.

5.1.1 Karakteristik Responden

Dari hasil kuesioner yang telah berhasil diperoleh dapat diuraikan diskripsi karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel 5.1
Responden

NO	Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	BNP	20	16
2	BNK/Kota	105	84
JUMLAH		125	100

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari tabel diatas dapat diuraikan responden dalam penelitian ini yaitu 16% responden BNP dan 84% responden BNK/Kota.

5.1.2 Variabel Penelitian

Sebagai analisis pokok dalam penelitian ini, ada 6 (enam) variabel yang akan digambarkan dalam sub bab ini yaitu variabel komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi dan pelaksanaan program. Variabel-variabel tersebut merupakan hasil penjabaran dari teori-teori

yang dikembangkan oleh Edward III dan juga Van Meter & Van Horn tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Semakin tinggi skor variabel tersebut maka akan semakin berhasil pula implementasi kebijakan publik dimaksud. Berikut analisis variabel penelitian yang dibagi menjadi 2 (dua) analisis yaitu analisis BNP dan analisis BNK/Kota.

5.1.2.1 Analisis Data tentang Implementasi Kebijakan Stranas P4GN di BNP

Faktor-faktor yang akan diukur dalam Implementasi Kebijakan Stranas P4GN di BNP meliputi 6 (enam) variabel yaitu variabel komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi dan pelaksanaan program. Berikut analisis ke-enam variabel dimaksud :

5.1.2.1.1 Variabel Komunikasi

Komunikasi merupakan persyaratan pertama dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut memahami dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan, jika ada suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan.

Tabel 5.2

(p1) Pendapat responden di BNP tentang pemahaman maksud dan tujuan kebijakan stranas P4GN BNN tahun 2005-2009

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memahami	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Memahami	0	0.0	0.0	0.0
	Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	10.0
	Memahami	6	30.0	30.0	40.0
	Sangat Memahami	12	60.0	60.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (60%) menyatakan sangat memahami maksud dan tujuan kebijakan stranas P4GN, dan 30% responden menyatakan memahami maksud dan tujuan kebijakan stranas P4GN sedangkan 10% lainnya menyatakan ragu-ragu. Hal ini berarti bahwa secara umum implementasi kebijakan stranas P4GN sudah dipahami oleh para pelaksana di BNP.

Tabel 5.3
(p2) Pendapat responden di BNP terhadap pemahaman dan pengetahuan BNP untuk melaksanakan program P4GN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memahami	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Memahami	0	0.0	0.0	0.0
	Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
	Sangat Memahami	10	50.0	50.0	100.0
	Memahami	10	50.0	50.0	50.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Sama halnya dengan pemahaman maksud dan tujuan kebijakan stranas P4GN, pemahaman responden tentang pemahaman dan pengetahuan BNP melaksanakan program P4GN menunjukkan bahwa responden sangat memahami dan memahami langkah-langkah dalam upaya melaksanakan program P4GN di daerah hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yaitu 50% responden menyatakan sangat memahami dan 50% responden lainnya menyatakan memahami.

Tabel 5.4
(p3) Pendapat responden di BNP terhadap sosialisasi program P4GN yang dilakukan oleh BNN kepada BNP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Setuju	1	5.0	5.0	5.0
	Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	15.0
	Setuju	11	55.0	55.0	70.0
	Sangat Setuju	6	30.0	30.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Sosialisasi program P4GN yang dilakukan BNN ke BNP, menunjukkan bahwa sebagian besar (55%) responden menyatakan setuju bahwa program P4GN telah disosialisasikan BNN kepada BNP, 30% menyatakan sangat setuju program P4GN telah disosialisasikan, sedangkan 10% menyatakan ragu-ragu dan 5% lainnya menyatakan kurang setuju program P4GN telah disosialisasikan BNN kepada BNP.

Tabel 5.5
(p4) Pendapat responden di BNP tentang pemahaman BNP terhadap program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memahami	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Memahami	0	0.0	0.0	0.0
	Ragu-Ragu	1	5.0	5.0	5.0
	Memahami	14	70.0	70.0	75.0
	Sangat Memahami	5	25.0	25.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Pemahaman responden terhadap program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN menunjukkan bahwa sebagian besar (70%) responden menyatakan memahami pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN, sedangkan 25% menyatakan sangat memahami dan 5% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.6
(p5) Pendapat responden di BNP tentang penyesuaian kedudukan, tugas dan fungsi BNP terhadap program P4GN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	5.0	5.0	5.0
	Kurang Setuju	5	25.0	25.0	30.0
	Ragu-Ragu	1	5.0	5.0	35.0
	Setuju	11	55.0	55.0	90.0
	Sangat Setuju	2	10.0	10.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Pemahaman responden tentang penyesuaian kedudukan, tugas dan fungsi BNP terhadap program P4GN menunjukkan bahwa sebagian besar (55%) responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan program P4GN disesuaikan dengan kedudukan, tugas dan fungsi BNP masing-masing daerah, 25% responden menyatakan kurang setuju, 10% responden menyatakan sangat setuju, dan sisanya masing-masing 5% responden menyatakan tidak setuju dan ragu-ragu.

Tabel 5.7
(p6) Pendapat responden di BNP tentang penanganan narkoba hanya diserahkan kepada BNN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	13	65.0	65.0	65.0
	Kurang Setuju	4	20.0	20.0	85.0
	Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
	Setuju	2	10.0	10.0	95.0
	Sangat Setuju	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Pendapat responden terhadap penanganan narkoba hanya diserahkan kepada BNN menunjukkan bahwa hampir sebagian besar (65%) responden menyatakan tidak setuju penanganan narkoba hanya diserahkan kepada BNN saja, 20% responden menyatakan kurang setuju, dan 10% responden menyatakan setuju sedangkan 5% lainnya menyatakan sangat setuju penanganan narkoba diserahkan kepada BNN.

5.1.2.1.2 Variabel Sumber Daya

Sumberdaya-sumberdaya yang digunakan dalam implementasi kebijakan stranas P4GN (SDM, Dana, dan Sarana Prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana. Ketersediaan sumberdaya dalam implementasi kebijakan stranas P4GN adalah sangat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.

Tabel 5.8
(p7) Pendapat responden di BNP tentang jumlah SDM di BNP apakah sudah memadai untuk melaksanakan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memadai	10	50.0	50.0	50.0
	Kurang Memadai	6	30.0	30.0	80.0
	Ragu-Ragu	1	5.0	5.0	85.0
	Memadai	2	10.0	10.0	95.0
	Sangat Memadai	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar (50%) responden menyatakan bahwa jumlah SDM untuk melaksanakan program P4GN

di daerah tidak memadai, 30% responden menyatakan kurang memadai, sedangkan 10% responden menyatakan memadai dan sisanya masing-masing 5% menyatakan sangat memadai dan ragu-ragu. Hal ini berarti bahwa secara umum SDM di BNP belum memadai untuk melaksanakan program P4GN.

Tabel 5.9
(p8) Pendapat responden di BNP tentang SDM di BNP apakah telah memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan/diperlukan untuk mengawaki BNP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memenuhi	6	30.0	30.0	30.0
Kurang Memenuhi	10	50.0	50.0	80.0
Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	90.0
Memenuhi	1	5.0	5.0	95.0
Sangat Memenuhi	1	5.0	5.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar (50%) responden menyatakan bahwa SDM di BNP kurang memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan/diperlukan untuk mengawaki BNP, 30% responden menyatakan tidak memenuhi standar kualifikasi, sedangkan 10% responden menyatakan ragu-ragu dan masing-masing sebesar 5% menyatakan sangat memenuhi dan memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan untuk mengawaki BNP.

Tabel 5.10
(p9) Pendapat responden di BNP tentang SDM di BNP apakah mempunyai pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan perannya dalam mencapai visi dan misi organisasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memenuhi	5	25.0	25.0	25.0
Kurang Memenuhi	8	40.0	40.0	65.0
Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	75.0
Memenuhi	4	20.0	20.0	95.0
Sangat Memenuhi	1	5.0	5.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa 40% responden menyatakan kurang memenuhi bekal pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang cukup, 25% responden menyatakan tidak memenuhi, 20% responden menyatakan

memenuhi, 10% responden menyatakan ragu-ragu dan 5% responden lainnya menyatakan sangat memenuhi.

Tabel 5.11
(p10) Pendapat responden di BNP tentang dukungan dana yang cukup terhadap SDM di BNP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Didukung	9	45.0	45.0	45.0
Kurang Didukung	6	30.0	30.0	75.0
Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	85.0
Didukung	1	5.0	5.0	90.0
Sangat Didukung	2	10.0	10.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa 45% responden menyatakan pendapat bahwa SDM di BNP tidak didukung dana yang cukup untuk pelaksanaan program P4GN, 30% responden menyatakan kurang didukung dana yang cukup, sedangkan masing-masing responden (10%) menyatakan ragu-ragu dan sangat didukung serta 5% lainnya menyatakan didukung dengan dana yang cukup untuk melaksanakan program P4GN di daerah.

Tabel 5.12
(p11) Pendapat responden di BNP tentang alokasi dana khusus untuk pelaksanaan program P4GN di daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	5.0	5.0	5.0
Kurang Setuju	5	25.0	25.0	30.0
Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	40.0
Setuju	10	50.0	50.0	90.0
Sangat Setuju	2	10.0	10.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar (50%) responden menyatakan setuju ada alokasi dana khusus untuk pelaksanaan program P4GN, 25% responden menyatakan kurang setuju, dan masing-masing 10% responden menyatakan sangat setuju dan ragu-ragu sedangkannya 10% responden lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 5.13
(p12) Pendapat responden di BNP tentang jumlah dana yang dialokasikan apakah sudah menunjang dalam pelaksanaan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menunjang	4	20.0	20.0	20.0
	Kurang Menunjang	10	50.0	50.0	70.0
	Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	80.0
	Menunjang	3	15.0	15.0	95.0
	Sangat Menunjang	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar (50%) responden menyatakan bahwa jumlah dana yang dialokasikan kurang menunjang dalam pelaksanaan program P4GN di daerah, 20% responden menyatakan tidak menunjang, 10% responden menyatakan ragu-ragu, sedangkan 15% responden menyatakan jumlah dana yang dialokasikan sudah menunjang pelaksanaan program P4GN di daerah dan 5% lainnya menyatakan jumlah dana yang dialokasikan sangat menunjang pelaksanaan program P4GN di daerah.

Tabel 5.14
(p13) Pendapat responden di BNP tentang dukungan sarana prasarana apakah sudah menunjang program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menunjang	5	25.0	25.0	25.0
	Kurang Menunjang	7	35.0	35.0	60.0
	Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	70.0
	Menunjang	5	25.0	25.0	95.0
	Sangat Menunjang	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa 35% responden menyatakan bahwa dukungan sarana prasarana di BNP kurang menunjang dalam melaksanakan program P4GN, 25% responden menyatakan tidak menunjang, 10% menyatakan ragu-ragu dan sisanya sebesar 25% dan 5% menyatakan dukungan sarana prasarana sudah menunjang dan sangat menunjang dalam pelaksanaan program P4GN di daerah.

5.1.2.1.3 Variabel Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menyangkut prosedur-prosedur kerja dan pragmentasi. Prosedur-prosedur berkembang secara internal dari respon terhadap tugas untuk keseragaman demi pencapaian tugas dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 5.15
(p14) Pendapat responden di BNP tentang kebijakan stranas P4GN apakah dapat dijadikan sebagai pedoman tupoksi bagi BNP dalam melaksanakan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	5.0	5.0	5.0
	Kurang Setuju	2	10.0	10.0	15.0
	Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	25.0
	Setuju	10	50.0	50.0	75.0
	Sangat Setuju	5	25.0	25.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Memperhatikan data diatas, dapat diketahui bahwa 50% responden menyatakan pendapat setuju bahwa kebijakan strategi nasional P4GN dapat dijadikan sebagai pedoman tupoksi bagi BNP dalam melaksanakan program P4GN di daerah, 25% responden menyatakan sangat setuju, masing-masing 10% responden menyatakan kurang setuju dan ragu-ragu sedangkan 5% responden lainnya menyatakan tidak setuju stranas P4GN dijadikan sebagai pedoman tupoksi.

Tabel 5.16
(p15) Pendapat responden di BNP tentang pelaksanaan program P4GN di daerah apakah masih mengalami hambatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	10.0
	Setuju	9	45.0	45.0	55.0
	Sangat Setuju	9	45.0	45.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Memperhatikan data diatas, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar responden (masing-masing 45%) menyatakan pendapat sangat setuju dan setuju

bahwa pelaksanaan program P4GN di daerah masih mengalami hambatan, sedangkan 10% responden lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.17
(p16) Pendapat responden di BNP tentang keberhasilan pelaksanaan program P4GN di daerah adalah dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	1	5.0	5.0	5.0
Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
Setuju	8	40.0	40.0	45.0
Sangat Setuju	11	55.0	55.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa hampir sebagian besar (55% dan 40%) responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa keberhasilan pelaksanaan program P4GN di daerah adalah dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait, sedangkan 5% responden lainnya menyatakan kurang setuju.

Tabel 5.18
(p17) Pendapat responden di BNP tentang pelaksanaan program P4GN di daerah dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait setempat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
Setuju	6	30.0	30.0	30.0
Sangat Setuju	14	70.0	70.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (70%) menyatakan sangat setuju bahwa untuk pelaksanaan program P4GN di daerah dibutuhkan kerjasama dengan instansi terkait dan 30% responden menyatakan setuju.

5.1.2.1.4 Variabel Kecenderungan

Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana sangat menentukan dalam pelaksanaan, tingkah laku mereka terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya mempengaruhi hasil selanjutnya. Tingkah laku ini juga menyangkut cara pandang terhadap sesuatu hal atau kebijakan.

Tabel 5.19
(p18) Pendapat responden di BNP tentang adanya dukungan Pemda dalam upaya melaksanakan program P4GN di daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	5.0	5.0	5.0
Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	4	20.0	20.0	25.0
Setuju	8	40.0	40.0	65.0
Sangat Setuju	7	35.0	35.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan program P4GN di daerah adalah sangat diharapkan, hal ini terlihat dari jawaban responden yang menyatakan sebesar 40% setuju ada dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program P4GN, 35% menyatakan sangat setuju, dan 20% responden menyatakan ragu-ragu sedangkan 5% lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 5.20
(p19) Pendapat responden di BNP tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BNP perlu adanya dukungan Payung Hukum seperti UU, PP maupun Perda

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	5.0	5.0	5.0
Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	1	5.0	5.0	10.0
Setuju	6	30.0	30.0	40.0
Sangat Setuju	12	60.0	60.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dukungan payung hukum seperti UU, PP maupun Perda bagi BNP untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya juga sangatlah diperlukan, hal ini terlihat dari jawaban sebagian besar responden yang menyatakan sebesar (60%) sangat

setuju bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya BNP didukung dengan payung hukum, 30% responden menyatakan setuju dan lainnya masing-masing sebesar 5% menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju.

Tabel 5.21
(p20) Pendapat responden di BNP tentang perlunya dukungan dari Pemda, LSM, Swasta serta Masyarakat dalam implementasi program P4GN di daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	1	5.0	5.0	5.0
Setuju	5	25.0	25.0	30.0
Sangat Setuju	14	70.0	70.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Peranan/dukungan dari Pemda, LSM, Swasta serta Masyarakat dalam implementasi program P4GN adalah mutlak diperlukan. Keberhasilan program P4GN akan sangat ditentukan bagaimana partisipasi pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat dalam program P4GN tersebut. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar (70%) responden menyatakan sangat setuju untuk melaksanakan program P4GN di daerah memerlukan dukungan dari Pemda, LSM, swasta maupun masyarakat dan 25% responden menyatakan setuju, sedangkan 5% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.22
(p21) Pendapat responden di BNP tentang konsekuensi kelembagaan BNP menjadi perangkat daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid\ Tidak Setuju	3	15.0	15.0	15.0
Kurang Setuju	2	10.0	10.0	25.0
Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
Setuju	7	35.0	35.0	60.0
Sangat Setuju	8	40.0	40.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, menunjukkan bahwa 40% responden menyatakan sangat setuju bahwa kelembagaan BNP dijadikan menjadi perangkat daerah dan 35%

responden menyatakan setuju, 15% responden menyatakan tidak setuju, sedangkan 10% lainnya menyatakan kurang setuju.

5.1.2.1.5 Variabel Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi sangatlah mutlak diperlukan. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Tabel 5.23
(p22) Pendapat responden di BNP tentang penanganan narkoba dilaksanakan melalui koordinasi terpusat (BNN) agar terdapat keseragaman dalam menangani kasus narkoba di daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	5.0	5.0	5.0
Kurang Setuju	1	5.0	5.0	10.0
Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	20.0
Setuju	8	40.0	40.0	60.0
Sangat Setuju	8	40.0	40.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 40% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa penanganan narkoba dilaksanakan melalui koordinasi terpusat, 10% responden menyatakan ragu-ragu dan masing-masing sebesar 5% menyatakan tidak setuju dan kurang setuju penanganan narkoba dilaksanakan melalui koordinasi terpusat.

Tabel 5.24
(p23) Pendapat responden di BNP tentang pelaksanaan program P4GN di daerah memerlukan hubungan koordinasi yang baik dengan BNN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
Setuju	6	30.0	30.0	30.0
Sangat Setuju	14	70.0	70.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Salah satu hal penting untuk keberhasilan suatu kebijakan adalah adanya hubungan koordinasi yang baik. Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar (70%) responden menyatakan sangat setuju pelaksanaan program P4GN di daerah memerlukan hubungan koordinasi yang baik dengan BNN dan 30% responden lainnya menyatakan setuju.

Tabel 5.25
(p24) Pendapat responden di BNP tentang pelaksanaan rapat koordinasi dengan BNN apakah sudah memadai dalam melaksanakan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Setuju	9	45.0	45.0	45.0
	Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	55.0
	Setuju	6	30.0	30.0	85.0
	Sangat Setuju	3	15.0	15.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Memperhatikan data diatas, menunjukkan bahwa 45% responden menyatakan kurang setuju bila pelaksanaan rapat koordinasi dengan BNN dikatakan sudah memadai untuk melaksanakan program P4GN di daerah, 30% responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan rapat koordinasi sudah memadai, 15% responden menyatakan sangat setuju sedangkan 10% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.26
(p25) Pendapat responden di BNP tentang perlunya rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
	Setuju	8	40.0	40.0	40.0
	Sangat Setuju	12	60.0	60.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, menunjukkan sebagian besar (60%) responden menyatakan sangat setuju bahwa rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait diperlukan dalam melaksanakan program P4GN di daerah, dan sisanya 40% responden menyatakan setuju.

5.1.2.1.6 Variabel Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program diperlukan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan sudah diimplementasikan dengan sangat baik.

Tabel 5.27
(p26) Pendapat responden di BNP tentang kebijakan strategi nasional P4GN apakah sudah dirasakan cukup sebagai pedoman dalam pelaksanaan program P4GN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	7	35.0	35.0	35.0
Ragu-Ragu	1	5.0	5.0	40.0
Setuju	9	45.0	45.0	85.0
Sangat Setuju	3	15.0	15.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, diketahui bahwa 45% responden menyatakan setuju bahwa kebijakan strategi nasional P4GN sudah dirasakan cukup sebagai pedoman pelaksanaan program P4GN, 35% responden menyatakan kurang setuju, 15% menyatakan sangat setuju dan 5% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.28
(p27) Pendapat responden di BNP tentang pelaksanaan program P4GN di daerah apakah sudah dijalankan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan strategi nasional P4GN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	5.0	5.0	5.0
Kurang Setuju	1	5.0	5.0	10.0
Ragu-Ragu	2	10.0	10.0	20.0
Setuju	13	65.0	65.0	85.0
Sangat Setuju	3	15.0	15.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Memperhatikan data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar (65%) responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan program P4GN di daerah sudah dijalankan sesuai pedoman yang ada dalam kebijakan stranas P4GN, 15%

menyatakan sangat setuju, 10% menyatakan ragu-ragu dan lainnya masing-masing sebesar 5% menyatakan tidak setuju dan kurang setuju.

Tabel 5.29
(p28) Pendapat responden di BNP tentang pelaksanaan progam P4GN di daerah masih mengalami kendala

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	3	15.0	15.0	15.0
Ragu-Ragu	4	20.0	20.0	35.0
Setuju	10	50.0	50.0	85.0
Sangat Setuju	3	15.0	15.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar(50%) responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan program P4GN di daerah masih mengalami kendala, 20% menyatakan ragu-ragu dan masing-masing sebesar 15% menyatakan sangat setuju dan kurang setuju pelaksanaan program P4GN di daerah masih mengalami kendala.

Tabel 5.30
(p29) Pendapat responden di BNP tentang implementasi kebijakan strategi nasional P4GN perlu untuk dimonitor dan dievaluasi secara baik untuk membuktikan efektifitas keberhasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	1	5.0	5.0	5.0
Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
Setuju	7	35.0	35.0	40.0
Sangat Setuju	12	60.0	60.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 60% menyatakan sangat setuju implementasi kebijakan strategi nasional P4GN perlu untuk dimonitor dan dievaluasi untuk membuktikan efektifitas keberhasilan program P4GN, 35% menyatakan setuju dan 5% lainnya menyatakan kurang setuju.

5.1.2.2 Analisis Data tentang Implementasi Kebijakan Stranas P4GN di BNK/Kota

Faktor-faktor yang akan diukur dalam Implementasi Kebijakan Stranas P4GN di BNK/Kota yang meliputi 6 (enam) variabel yaitu variabel komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi dan pelaksanaan program. Berikut analisis ke-enam variabel dimaksud :

5.1.2.2.1 Variabel Komunikasi

Komunikasi merupakan persyaratan pertama dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut memahami dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan, jika ada suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan.

Tabel 5.31

(p1) Pendapat responden di BNK/Kota tentang pemahaman maksud dan tujuan kebijakan stranas P4GN BNN tahun 2005-2009

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memahami	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Memahami	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
Memahami	52	49.5	49.5	49.5
Sangat Memahami	53	50.5	50.5	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Pemahaman maksud dan tujuan kebijakan stranas P4GN, menunjukkan bahwa responden sangat memahami dan memahami maksud dan tujuan kebijakan stranas P4GN, ini dapat dilihat dari jawaban responden yaitu 50.5% responden menyatakan sangat memahami dan 49.5% responden lainnya menyatakan memahami. Hal ini berarti bahwa secara umum implementasi kebijakan strategi nasional P4GN sudah dipahami oleh BNK/Kota.

Tabel 5.32
(p2) Pendapat responden di BNK/Kota terhadap pemahaman dan pengetahuan BNK/Kota untuk melaksanakan program P4GN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memahami	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Memahami	2	1.9	1.9	1.9
	Ragu-Ragu	1	1.0	1.0	2.9
	Memahami	59	56.2	56.2	59.0
	Sangat Memahami	43	41.0	41.0	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Sama halnya dengan pemahaman maksud dan tujuan kebijakan stranas P4GN, pemahaman responden tentang pemahaman dan pengetahuan BNK/Kota melaksanakan program P4GN menunjukkan bahwa sebagian besar (56.2%) responden menyatakan memahami langkah-langkah dalam upaya melaksanakan program P4GN di daerah, 41% responden menyatakan sangat memahami, sedangkan 1.9% responden menyatakan kurang memahami dan 1% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.33
(p3) Pendapat responden di BNK/Kota terhadap sosialisasi program P4GN yang dilakukan oleh BNN dan BNP ke BNK/Kota

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Setuju	21	20.0	20.0	20.0
	Ragu-Ragu	3	2.9	2.9	22.9
	Setuju	54	51.4	51.4	74.3
	Sangat Setuju	27	25.7	25.7	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Sosialisasi program P4GN yang dilakukan BNN dan BNP ke BNK/Kota, menunjukkan bahwa sebagian besar (51.4%) responden menyatakan setuju bahwa program P4GN telah disosialisasikan BNN dan BNP ke BNK/Kota, 25.7% menyatakan sangat setuju program P4GN telah disosialisasikan, sedangkan 20% menyatakan kurang setuju dan 2.9% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.34
(p4) Pendapat responden di BNK/Kota tentang pemahaman BNK/Kota terhadap program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memahami	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Memahami	5	4.8	4.8	4.8
	Ragu-Ragu	2	1.9	1.9	6.7
	Memahami	74	70.5	70.5	77.1
	Sangat Memahami	24	22.9	22.9	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Pemahaman responden terhadap program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN menunjukkan bahwa sebagian besar 70.5% responden menyatakan memahami pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN, 22.9% responden menyatakan sangat memahami, sedangkan 4.8% menyatakan kurang memahami dan 1.9 lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.35
(p5) Pendapat responden di BNK/Kota tentang penyesuaian kedudukan, tugas dan fungsi BNK/Kota terhadap program P4GN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	8	7.6	7.6	7.6
	Kurang Setuju	29	27.6	27.6	35.2
	Ragu-Ragu	5	4.8	4.8	40.0
	Setuju	56	53.3	53.3	93.3
	Sangat Setuju	7	6.7	6.7	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Pemahaman responden tentang penyesuaian kedudukan, tugas dan fungsi BNK/Kota terhadap program P4GN menunjukkan bahwa sebagian besar 53.3% responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan program P4GN disesuaikan dengan kedudukan, tugas dan fungsi BNK/Kota masing-masing daerah, 27.6% responden menyatakan kurang setuju, 7.6% responden menyatakan tidak setuju, sedangkan 6.7% menyatakan sangat setuju dan 4.8% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.36
(p6) Pendapat responden di BNK/Kota tentang penanganan narkoba hanya diserahkan kepada BNN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	70	66.7	66.7	66.7
	Kurang Setuju	15	14.3	14.3	81.0
	Ragu-Ragu	5	4.8	4.8	85.7
	Setuju	13	12.4	12.4	98.1
	Sangat Setuju	2	1.9	1.9	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Pendapat responden terhadap penanganan narkoba hanya diserahkan kepada BNN menunjukkan bahwa hampir sebagian besar 66.7% responden menyatakan tidak setuju bila penanganan narkoba hanya diserahkan kepada BNN saja, 14.3% responden menyatakan kurang setuju, 12.4% responden menyatakan setuju, 4.8% menyatakan ragu-ragu sedangkan 1.9% lainnya menyatakan sangat setuju.

5.1.2.2.2 Variabel Sumber Daya

Sumberdaya-sumberdaya yang digunakan dalam implementasi kebijakan stranas P4GN (SDM, dana, dan sarana prasarana) sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana. Ketersediaan sumberdaya dalam implementasi kebijakan stranas P4GN adalah sangat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.

Tabel 5.37
(p7) Pendapat responden di BNK/Kota tentang jumlah SDM di BNK/Kota apakah sudah memadai untuk melaksanakan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memadai	14	13.3	13.3	13.3
	Kurang Memadai	58	55.2	55.2	68.6
	Ragu-Ragu	3	2.9	2.9	71.4
	Memadai	26	24.8	24.8	96.2
	Sangat Memadai	4	3.8	3.8	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 55.2% responden menyatakan bahwa jumlah SDM untuk melaksanakan program P4GN

di daerah kurang memadai, 24.8% responden menyatakan memadai, 13.3% responden menyatakan tidak memadai, sedangkan 3.8% responden menyatakan sangat memadai dan 2.9% lainnya menyatakan ragu-ragu

Tabel 5.38
(p8) Pendapat responden di BNK tentang SDM di BNK/Kota apakah sudah memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan/diperlukan untuk mengawaki BNK/Kota

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memenuhi	2	1.9	1.9	1.9
Kurang Memenuhi	53	50.5	50.5	52.4
Ragu-Ragu	5	4.8	4.8	57.1
Memenuhi	41	39.0	39.0	96.2
Sangat Memenuhi	4	3.8	3.8	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar 50.5% responden menyatakan bahwa SDM di BNK/Kota kurang memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan/diperlukan untuk mengawaki BNK/Kota, 39% responden menyatakan memenuhi standar kualifikasi, 4.8% responden menyatakan ragu-ragu, sedangkan 3.8% responden menyatakan sangat memenuhi dan 1.9% lainnya berpendapat tidak memenuhi.

Tabel 5.39
(p9) Pendapat responden di BNK/Kota tentang SDM di BNK/Kota apakah sudah mempunyai pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan perannya dalam mencapai visi dan misi organisasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Memenuhi	17	16.2	16.2	16.2
Kurang Memenuhi	43	41.0	41.0	57.1
Ragu-Ragu	10	9.5	9.5	66.7
Memenuhi	34	32.4	32.4	99.0
Sangat Memenuhi	1	1.0	1.0	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa 41% responden menyatakan kurang memenuhi bekal pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang cukup, 32.4% responden menyatakan memenuhi, 16.2% responden menyatakan tidak

memenuhi, sedangkan 9.5% responden menyatakan ragu-ragu dan 1% lainnya berpendapat sangat memenuhi.

Tabel 5.40
(p10) Pendapat responden di BNK/Kota tentang dukungan dana yang cukup terhadap SDM di BNK/Kota

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Didukung	26	24.8	24.8	24.8
	Kurang Didukung	60	57.1	57.1	81.9
	Ragu-Ragu	5	4.8	4.8	86.7
	Didukung	13	12.4	12.4	99.0
	Sangat Didukung	1	1.0	1.0	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 57.1% responden menyatakan pendapat bahwa SDM di BNK/Kota kurang didukung dana yang cukup untuk pelaksanaan program P4GN, 24.8% responden menyatakan tidak didukung dana yang cukup, 12.4% responden menyatakan didukung dana yang cukup, sedangkan 4.8% responden menyatakan ragu-ragu, dan 1% lainnya menyatakan sangat didukung.

Tabel 5.41
(p11) Pendapat responden di BNK/Kota tentang alokasi dana khusus untuk pelaksanaan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	16	15.2	15.2	15.2
	Kurang Setuju	26	24.8	24.8	40.0
	Ragu-Ragu	9	8.6	8.6	48.6
	Setuju	42	40.0	40.0	88.6
	Sangat Setuju	12	11.4	11.4	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa 40% responden menyatakan setuju ada alokasi dana khusus untuk pelaksanaan program P4GN, 24.8% responden menyatakan kurang setuju, 15.2% menyatakan tidak setuju, sedangkan 11.4% menyatakan sangat setuju ada alokasi dana khusus dan 8.6% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.42
(p12) Pendapat responden di BNK/Kota tentang jumlah dana yang dialokasikan apakah sudah menunjang dalam pelaksanaan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menunjang	18	17.1	17.1	17.1
	Kurang Menunjang	59	56.2	56.2	73.3
	Ragu-Ragu	7	6.7	6.7	80.0
	Menunjang	20	19.0	19.0	99.0
	Sangat Menunjang	1	1.0	1.0	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar 56.2% responden menyatakan bahwa jumlah dana yang dialokasikan kurang menunjang dalam pelaksanaan program P4GN di daerah, 19% responden menyatakan sudah menunjang, 17.1% responden menyatakan tidak menunjang, sedangkan 6.7% responden menyatakan ragu-ragu, dan 1% lainnya menyatakan sangat menunjang.

Tabel 5.43
(p13) Pendapat responden di BNK/Kota tentang dukungan sarana prasarana apakah sudah menunjang program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menunjang	19	18.1	18.1	18.1
	Kurang Menunjang	72	68.6	68.6	86.7
	Ragu-Ragu	4	3.8	3.8	90.5
	Menunjang	10	9.5	9.5	100.0
	Sangat Menunjang	0	0.0	0.0	0.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 68.6% responden menyatakan bahwa dukungan sarana prasarana di BNK/Kota kurang menunjang dalam melaksanakan program P4GN, 18.1% responden menyatakan tidak menunjang, sedangkan 9.5% menyatakan sarana prasarana yang dimiliki sekarang sudah menunjang program P4GN dan 3.8% lainnya menyatakan ragu-ragu.

5.1.2.2.3 Variabel Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menyangkut prosedur-prosedur kerja dan pragmentasi. Prosedur-prosedur berkembang secara internal dari respon terhadap tugas untuk keseragaman demi pencapaian tugas dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 5.44
(p14) Pendapat responden di BNK/Kota tentang kebijakan stranas P4GN apakah dapat dijadikan pedoman tupoksi bagi BNK/Kota dalam melaksanakan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	1.9	1.9	1.9
	Kurang Setuju	11	10.5	10.5	12.4
	Ragu-Ragu	2	1.9	1.9	14.3
	Setuju	59	56.2	56.2	70.5
	Sangat Setuju	31	29.5	29.5	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Memperhatikan data diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 56.2% responden menyatakan pendapat setuju bahwa kebijakan strategi nasional P4GN dapat dijadikan sebagai pedoman tupoksi bagi BNK/Kota dalam melaksanakan program P4GN di daerah, 29.5% responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 10.5% responden menyatakan kurang setuju dan sisanya masing-masing 1.9% responden menyatakan tidak setuju dan ragu-ragu.

Tabel 5.45
(p15) Pendapat responden di BNK/Kota tentang pelaksanaan program P4GN di daerah apakah masih mengalami hambatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	1.9	1.9	1.9
	Kurang Setuju	8	7.6	7.6	9.5
	Ragu-Ragu	5	4.8	4.8	14.3
	Setuju	65	61.9	61.9	76.2
	Sangat Setuju	25	23.8	23.8	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Memperhatikan data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 61.9% menyatakan pendapat setuju bahwa pelaksanaan program P4GN di daerah masih mengalami hambatan, 23.8% responden menyatakan sangat setuju,

7.6% responden menyatakan kurang setuju, sedangkan 4.8% menyatakan ragu-ragu dan 1.9% lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 5.46
(p16) Pendapat responden di BNK/Kota tentang keberhasilan pelaksanaan program P4GN di daerah adalah dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Ragu-Ragu	3	2.9	2.9	3.8
	Setuju	56	53.3	53.3	57.1
	Sangat Setuju	45	42.9	42.9	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa hampir sebagian besar (53.3% dan 42.9%) responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa keberhasilan pelaksanaan program P4GN di daerah adalah dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait, sedangkan 2.9% responden menyatakan ragu-ragu dan 1% lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 5.47
(p17) Pendapat responden di BNK/Kota tentang pelaksanaan program P4GN di daerah dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait setempat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Ragu-Ragu	1	1.0	1.0	1.0
	Setuju	50	47.6	47.6	48.6
	Sangat Setuju	54	51.4	51.4	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar (51.4% dan 47.6%) responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa untuk pelaksanaan program P4GN di daerah dibutuhkan kerjasama dengan instansi terkait sedangkan 1% lainnya menyatakan ragu-ragu.

5.1.2.2.4 Variabel Kecenderungan

Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana sangat menentukan dalam pelaksanaan, tingkah laku mereka terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya mempengaruhi hasil selanjutnya. Tingkah laku ini juga menyangkut cara pandang terhadap sesuatu hal atau kebijakan.

Tabel 5.48
(p18) Pendapat responden di BNK/Kota tentang adanya dukungan Pemda dalam upaya melaksanakan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Kurang Setuju	4	3.8	3.8	4.8
	Ragu-Ragu	11	10.5	10.5	15.2
	Setuju	61	58.1	58.1	73.3
	Sangat Setuju	28	26.7	26.7	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan program P4GN di daerah adalah sangat diharapkan, hal ini terlihat dari jawaban responden yang menyatakan sebagian besar 58.1% responden setuju ada dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program P4GN, 26.7% menyatakan sangat setuju, sedangkan 10.5% responden menyatakan ragu-ragu, 3.8% responden menyatakan kurang setuju, dan 1% lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 5.49
(p19) Pendapat responden di BNK/Kota tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BNK/Kota perlu adanya dukungan Payung Hukum seperti UU, PP maupun Perda

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	2.9	2.9	2.9
	Kurang Setuju	3	2.9	2.9	5.7
	Ragu-Ragu	2	1.9	1.9	7.6
	Setuju	25	23.8	23.8	31.4
	Sangat Setuju	72	68.6	68.6	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dukungan payung hukum seperti UU, PP maupun Perda bagi BNK/Kota untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya juga sangatlah diperlukan, hal ini terlihat dari jawaban sebagian besar responden yang menyatakan sebesar 68.6%

sangat setuju bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya BNP didukung dengan payung hukum, 23.8% responden menyatakan setuju, sedangkan masing-masing sebesar 2.9% responden menyatakan tidak setuju dan kurang setuju, dan 1.9% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.50
(p20) Pendapat responden di BNK/Kota tentang perlunya dukungan dari Pemda, LSM, Swasta serta Masyarakat dalam implementasi program P4GN di daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Ragu-Ragu	1	1.0	1.0	1.9
Setuju	30	28.6	28.6	30.5
Sangat Setuju	73	69.5	69.5	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Peranan/dukungan dari Pemda, LSM, Swasta serta Masyarakat dalam implementasi program P4GN adalah mutlak diperlukan. Keberhasilan program P4GN akan sangat ditentukan bagaimana partisipasi pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat dalam program P4GN tersebut. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 69.5% responden menyatakan sangat setuju untuk melaksanakan program P4GN di daerah memerlukan dukungan dari Pemda, LSM, swasta maupun masyarakat, 28.6% responden menyatakan setuju, dan masing-masing 1% lainnya menyatakan kurang setuju dan ragu-ragu.

Tabel 5.51
(p21) Pendapat responden di BNK/Kota tentang konsekuensi kelembagaan BNK/Kota menjadi perangkat daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	6	5.7	5.7	5.7
Kurang Setuju	16	15.2	15.2	21.0
Ragu-Ragu	3	2.9	2.9	23.8
Setuju	35	33.3	33.3	57.1
Sangat Setuju	45	42.9	42.9	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, menunjukkan bahwa 42.9% responden menyatakan sangat setuju bahwa kelembagaan BNK/Kota dijadikan menjadi perangkat daerah, 33.3% responden menyatakan setuju, 15.2% responden menyatakan kurang

setuju, 5.7% responden menyatakan tidak setuju, dan 2.9% lainnya menyatakan ragu-ragu.

5.1.2.2.5 Variabel Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi sangatlah mutlak diperlukan. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Tabel 5.52
(p22) Pendapat responden di BNK/Kota tentang penanganan narkoba dilaksanakan melalui koordinasi terpusat (BNN) agar terdapat keseragaman dalam menangani kasus narkoba di daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	1.9	1.9	1.9
Kurang Setuju	20	19.0	19.0	21.0
Ragu-Ragu	8	7.6	7.6	28.6
Setuju	52	49.5	49.5	78.1
Sangat Setuju	23	21.9	21.9	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 49.5% responden menyatakan setuju penanganan narkoba dilaksanakan melalui koordinasi terpusat, 21.9% responden menyatakan sangat setuju, 19% menyatakan kurang setuju, sedangkan 7.6% menyatakan ragu-ragu dan 1.9% lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 5.53
(p23) Pendapat responden di BNK/Kota tentang pelaksanaan program P4GN di daerah memerlukan hubungan koordinasi yang baik dengan BNN dan BNP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	9	8.6	8.6	8.6
Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
Setuju	38	36.2	36.2	44.8
Sangat Setuju	58	55.2	55.2	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Salah satu hal penting untuk keberhasilan suatu kebijakan adalah adanya hubungan koordinasi yang baik. Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar 55.2% responden menyatakan sangat setuju pelaksanaan program P4GN di daerah memerlukan hubungan koordinasi yang baik dengan BNN, 36.2% responden menyatakan setuju dan 8.6% lainnya menyatakan kurang setuju.

Tabel 5.54
(p24) Pendapat responden di BNK/Kota tentang pelaksanaan rapat koordinasi dengan BNN apakah sudah memadai dalam melaksanakan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	5.7	5.7	5.7
	Kurang Setuju	32	30.5	30.5	36.2
	Ragu-Ragu	10	9.5	9.5	45.7
	Setuju	49	46.7	46.7	92.4
	Sangat Setuju	8	7.6	7.6	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Memperhatikan data diatas, menunjukkan bahwa 46.7% responden menyatakan setuju bila pelaksanaan rapat koordinasi dengan BNN dikatakan sudah memadai untuk melaksanakan program P4GN di daerah, 30.5% responden menyatakan kurang setuju pelaksanaan rapat koordinasi sudah memadai, 9.5% responden menyatakan ragu-ragu, sedangkan 7.6% responden menyatakan sangat setuju dan 5.7% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Tabel 5.55
(p25) Pendapat responden di BNK/Kota tentang perlunya rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program P4GN di daerah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
	Ragu-Ragu	1	1.0	1.0	1.0
	Setuju	47	44.8	44.8	45.7
	Sangat Setuju	57	54.3	54.3	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan data diatas, menunjukkan sebagian besar 54.3% responden menyatakan sangat setuju bahwa rapat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait diperlukan dalam melaksanakan program P4GN di daerah, 44.8% responden menyatakan setuju dan 1% responden lainnya menyatakan ragu-ragu.

5.1.2.2.6 Variabel Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program diperlukan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan sudah diimplementasikan dengan sangat baik.

Tabel 5.56
(p26) Pendapat responden di BNK/Kota tentang kebijakan strategi nasional P4GN apakah sudah dirasakan cukup sebagai pedoman dalam pelaksanaan program P4GN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	1.9	1.9	1.9
Kurang Setuju	6	5.7	5.7	7.6
Ragu-Ragu	16	15.2	15.2	22.9
Setuju	76	72.4	72.4	95.2
Sangat Setuju	5	4.8	4.8	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, diketahui bahwa sebagian besar 72.4% responden menyatakan setuju bahwa kebijakan strategi nasional P4GN sudah dirasakan cukup sebagai pedoman pelaksanaan program P4GN, 15.2% responden menyatakan ragu-ragu, 5.7% responden menyatakan kurang setuju, sedangkan 4.8% menyatakan sangat setuju dan 1.9% lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 5.57
(p27) Pendapat responden di BNK/Kota tentang pelaksanaan program P4GN di daerah apakah sudah dijalankan sesuai dengan pedoman yang ada dalam kebijakan strategi nasional P4GN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Kurang Setuju	28	26.7	26.7	27.6
Ragu-Ragu	19	18.1	18.1	45.7
Setuju	53	50.5	50.5	96.2
Sangat Setuju	4	3.8	3.8	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Memperhatikan data diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar 50.5% responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan program P4GN di daerah sudah dijalankan sesuai pedoman yang ada dalam kebijakan stranas P4GN, 26.7% menyatakan kurang setuju, 18.1% responden menyatakan ragu-ragu, sedangkan 3.8% responden menyatakan sangat setuju, dan 1% lainnya menyatakan tidak setuju.

Tabel 5.58
(p28) Pendapat responden di BNK/Kota tentang pelaksanaan program P4GN di daerah masih mengalami kendala

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	11	10.5	10.5	10.5
Ragu-Ragu	17	16.2	16.2	26.7
Setuju	55	52.4	52.4	79.0
Sangat Setuju	22	21.0	21.0	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 52.4% responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan program P4GN di daerah masih mengalami kendala, 21% menyatakan sangat setuju, sedangkan 16.2% responden menyatakan ragu-ragu dan 10.5% lainnya menyatakan kurang setuju.

Tabel 5.59
(p29) Pendapat responden di BNK/Kota tentang implementasi kebijakan strategi nasional P4GN perlu untuk dimonitor dan dievaluasi secara baik untuk membuktikan efektifitas keberhasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Kurang Setuju	0	0.0	0.0	0.0
Ragu-Ragu	0	0.0	0.0	0.0
Setuju	40	38.1	38.1	38.1
Sangat Setuju	65	61.9	61.9	100.0
Total	105	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari data diatas, menunjukkan bahwa responden (61.9% dan 38.1%) menyatakan sangat setuju dan setuju implementasi kebijakan strategi nasional P4GN perlu untuk dimonitor dan dievaluasi untuk membuktikan efektifitas keberhasilan program P4GN.

5.1.3 HASIL WAWANCARA

Tabel 5.60
Hasil Wawancara

No	Variabel	Kompilasi Hasil Wawancara		
		Kabag Org & Kepeg Lakhar BNN	BNP NAD	BNP Kalbar
1	Variabel Komunikasi Pemahaman maksud & tujuan stranas P4GN dan sosialisasi yang dilakukan	Program unggulan BNN dan Perpres No 83 Tahun 2007 telah sering disosialisasikan ke BNP dan BNK/Kota baik dengan mengundang BNP dan BNK/Kota ke Jakarta ataupun mengadakan sosialisasi ke daerah	Sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba ke sekolah-sekolah ataupun mengadakan test urine	Jarang mengadakan sosialisasi karena tidak adanya dukungan anggaran, kegiatan dilakukan ketika menjelang peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) saja.
2	Variabel Sumberdaya Apakah jumlah personil, dana/ anggaran, sarana prasarana di BNP dan BNK/Kota sudah mampu mendukung pelaksanaan program P4GN	BNN telah memberikan bantuan sarana prasarana berupa alat pengolah data, bahan-bahan penyuluhan maupun mobil untuk penyuluhan, dll	Belum, personil terdiri dari 30 instansi terkait dan masih mempunyai tugas rangkap, dukungan dana dari APBD sebesar 15 M sudah cukup, BNP sudah memiliki sekretariat sendiri, sarana prasarana seperti alat pengolah data sudah cukup	Belum, personil masih kurang, staf di BNP diperbantukan dari PNS Polri sehingga masih tugas rangkap, dukungan dana dari APBD tidak jelas, Sekretariat tetap BNP masih numpang di Binamitra
3	Variabel Struktur Birokrasi Bagaimana kelembagaan BNP dan BNK/Kota ?	Hampir sebagian besar BNP dan BNK/Kota masih mengacu Keppres 17 Tahun 2002	Masih mengacu pada Keppres 17 Tahun 2002 dan mau mengarah ke Perpres 83 Tahun 2007	Masih mengacu pada Keppres 17 Tahun 2002 karena Perpres No 83 Tahun 2007 dinilai belum tegas. Terutama dalam hal status kelembagaan yang sifatnya masih non-struktural dan juga bukan lembaga vertikal serta masih rancunya jabatan eselonisasi.

4	<p>Variabel Kecenderungan Apakah Pemda memiliki komitmen dan mendukung BNP dan BNK/Kota dalam upaya program P4GN? Dalam tugas dan wewenangnya apakah BNP dan BNK/Kota sudah didukung dengan payung hukum yang kuat di daerahnya?</p>	<p>Dilihat dari Perpres 83 Tahun 2007, setiap daerah provinsi, kab/kota wajib membentuk BNP dan BNK/Kota yang secara kelembagaan dan strukturnya menjadi perangkat daerah dan dibiayai oleh APBD. Untuk kelembagaan yang sudah didukung dengan perda yang sudah melapor ke BNN, di tingkat provinsi yaitu Bali, Lampung, Bengkulu, Kalsel, Jateng sedangkan untuk kabupaten di BNK/Kota Kupang</p>	<p>Pemda memiliki komitmen mendukung BNP dalam melaksanakan program P4GN.</p>	<p>Komitmen Pemda masih kurang dalam membantu BNP. BNP dan BNK/Kota belum diatur dalam peraturan daerah masih berupa peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota</p>
5	<p>Variabel Hubungan Antar Organisasi Apakah kerja sama dan koordinasi kerja antara BNN, BNP dan BNK/Kota maupun dengan instansi terkait berjalan dengan baik?</p>	<p>Setiap melakukan kegiatan BNP dan BNK/Kota berkoordinasi dengan BNN</p>	<p>Sudah berjalan dengan baik</p>	<p>Belum, koordinasi polri dengan pemda masih kurang solid</p>
6	<p>Variabel Pelaksanaan Program Hambatan dalam melaksanakan program P4GN di BNP dan BNK/Kota</p>	<p>-</p>	<p>SDM di BNP belum cukup mumpuni dalam melaksanakan program P4GN, SDM belum mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang penangan narkoba dan program P4GN BNK/Kota yang aktif di NAD masih 2 kabupaten.</p>	<p>Pelaksanaan program P4GN belum berjalan dengan baik karena dukungan dana/ anggaran dari APBD dari Pemda masih sangat kurang dan Kelembagaan BNP harus diperjelas lagi, perpres 83 harus dibuat menjadi UU terlebih dahulu sehingga kedudukan BNP menjadi lebih mantap.</p>

5.2 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI NASIONAL P4GN DI BNP DAN BNK/KOTA

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas baik BNP dan BNK/Kota, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

5.2.1 Variabel Komunikasi

Variabel komunikasi dioperasionalkan dalam 6 (enam) pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil penghitungan mean skor variabel komunikasi.

Tabel 5.61
Mean Total Skor Variabel Komunikasi BNP dan BNK/Kota

No	Pertanyaan	MEAN		
		BNP	BNK/Kota	GABUNGAN
1	<i>Pertanyaan 1</i>	4.50	4.50	4.50
2	<i>Pertanyaan 2</i>	4.50	4.36	4.38
3	<i>Pertanyaan 3</i>	4.10	3.83	3.87
4	<i>Pertanyaan 4</i>	4.20	4.11	4.13
5	<i>Pertanyaan 5</i>	3.40	3.24	3.26
6	<i>Pertanyaan 6</i>	1.70	1.69	1.69
Total Skor		22.4	21.73	21.83
Mean Total Skor		3.73	3.62	3.64

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor gabungan sebesar 3.64, menunjukkan bahwa komunikasi di BNP dan BNK/Kota sudah berjalan dalam kondisi baik.

Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam implementasi kebijakan strategi nasional P4GN, karena melalui komunikasi berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dapat diketahui oleh kelompok sasaran kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman maksud dan tujuan kebijakan stranas P4GN merupakan langkah awal didalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan. Dengan pemahaman yang tinggi oleh para pelaksana (implementor) kebijakan terhadap maksud dan tujuan kebijakan, maka secara teoritis kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara umum,

para pelaksana di BNP dan BNK/Kota sudah memahami maksud dan tujuan kebijakan strategi nasional P4GN.

Guna meningkatkan pengetahuan para pelaksana di BNP dan BNK/Kota tentang keberadaan Surat Keputusan Ketua BNN Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tanggal 31 Desember 2004 tentang Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) dan program-program P4GN yang menjadi unggulan BNN yang dapat dijadikan pedoman oleh BNP dan BNK/Kota dalam rangka menyusun program kegiatan di wilayah masing-masing serta pemahaman Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional melakukan sosialisasi baik dengan mengundang BNP dan BNK/Kota ke Jakarta maupun langsung melakukan sosialisasi ke daerah-daerah.

Pendapat bahwa suatu kebijakan telah disosialisasikan dengan baik terhadap para pelaksana di BNP dan BNK/Kota merupakan prasyarat kebijakan program P4GN dapat diterima, diketahui dan dipahami dengan baik. Dengan diterima, diketahui dan dipahami suatu kebijakan pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman BNP dan BNK/Kota terhadap segala aspek dalam kebijakan tersebut.

Sesuai pendapat Edward III yaitu komunikasi adalah merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan yang diharapkan kedua belah pihak mempunyai persepsi yang sama. Terdapat 3 (tiga) faktor yang akan mempengaruhi komunikasi yaitu : 1) transmisi, staf/pelaksana memahami betul arti kebijakan tersebut sehingga tidak terjadi suatu kesalahan persepsi dari aturan yang telah dibuat, 2). Kejelasan, perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan berupa petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan, 3) konsistensi, adanya kesempatan awal yang digunakan sebagai penuntun pelaksanaan program. Maka dapat disimpulkan faktor komunikasi di BNP dan BNK/Kota mendukung bagi suksesnya implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota.

5.2.2 Variabel Sumber Daya

Variabel sumberdaya dioperasionalkan dalam 7 (tujuh) pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil penghitungan mean skor variabel sumberdaya.

Tabel 5.62
Mean Total Skor Variabel Sumberdaya BNP dan BNK/Kota

No	Pertanyaan	MEAN		
		BNP	BNK/Kota	GABUNGAN
1	<i>Pertanyaan 7</i>	1.90	2.50	2.41
2	<i>Pertanyaan 8</i>	2.05	2.92	2.78
3	<i>Pertanyaan 9</i>	2.40	2.61	2.58
4	<i>Pertanyaan 10</i>	2.05	2.08	2.07
5	<i>Pertanyaan 11</i>	3.35	3.08	3.12
6	<i>Pertanyaan 12</i>	2.35	2.30	2.31
7	<i>Pertanyaan 13</i>	2.50	2.05	2.12
Total Skor		16.6	17.54	17.39
Mean Total Skor		2.37	2.51	2.48

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor gabungan 2.48, berarti bahwa kondisi sumber daya (SDM, dana, sarana prasarana) di BNP dan BNK/Kota tidak berjalan dengan baik.

Dalam implementasi suatu kebijakan, sumberdaya-sumberdaya yang digunakan dalam implementasi program P4GN (SDM, dana, sarana prasarana) adalah sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana. Ketersediaan sumberdaya maupun dukungan dana dalam implementasi program P4GN di BNP dan BNK/Kota adalah sangat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan utama yang terjadi di BNP dan BNK/Kota adalah keterbatasan personil, minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui APBD, maupun minimnya sarana prasarana yang dimiliki oleh BNP dan BNK/Kota. Berkaitan dengan SDM, personil di BNP dan BNK/Kota belum memadai dalam jumlah maupun bekal pengetahuan dan keahlian tentang penanganan narkoba maupun pelaksanaan program P4GN, hal ini disebabkan oleh personil BNP dan BNK/Kota yang masih menjabat

rangkap, personil banyak yang masih berstatus tenaga kontrak/PHL dan juga seringnya pergantian personil di lingkungan BNP dan BNK/Kota.

Dalam hal anggaran kegiatan operasional di BNP dan BNK/Kota sudah diatur dengan jelas pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Dana operasional BNP maupun BNK/Kota dibebankan ke APBD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Meskipun ada juga dana dari APBN melalui BNN dan dana bantuan tak mengikat. Namun demikian, bila BNP dan BNK/Kota hanya berpedoman pada Perpres No. 83 Tahun 2007 saja maka masih ada peluang dari legislatif (DPRD) untuk menolak dana lewat APBD tersebut karena pembentukan struktur kelembagaan BNP dan BNK/Kota hanya didasarkan pada peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota bukan dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini menyebabkan baru sebagian kecil dari BNP dan BNK/Kota yang sudah mendapat anggaran dari APBD itupun juga anggaran yang diberikan masih sedikit untuk mendukung kegiatan BNP dan BNK/Kota.

Sama halnya dengan ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan dana, ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Baru sebagian kecil dari BNP dan BNK/Kota yang sudah mempunyai kantor sekretariat tetap sendiri sehingga fungsi BNP dan BNK/Kota belum banyak terlihat.

Agar BNP dan BNK/Kota efektif maka harus menjadi miniatur dari BNN, yaitu anggarannya harus jelas, personilnya harus permanen dan memadai jumlahnya serta didukung dengan bekal pengetahuan dan keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas tersebut, satlak harus berdiri sendiri, apabila hal itu terwujud maka harus ada legitimasi dari segi kelembagaan, anggaran dan karir dari personil yang ditugaskan di BNP dan BNK/Kota harus jelas, sehingga koordinasi dan jalur informasi akan lebih permanen.

Sesuai pendapat Edward III, bahwa keberadaan sumberdaya merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, karena tanpa adanya sumber-sumber kebijakan yang sudah dibuat tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum variabel sumber daya (SDM, dana, sarana prasarana) belum memadai/belum mendukung suksesnya implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota.

5.2.3 Variabel Struktur Birokrasi

Variabel struktur birokrasi dioperasionalkan dalam 4 (empat) pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil penghitungan mean skor variabel struktur birokrasi.

Tabel 5.63
Mean Total Skor Variabel Struktur Birokrasi BNP dan BNK/Kota

No	Pertanyaan	MEAN		
		BNP	BNK/Kota	GABUNGAN
1	<i>Pertanyaan 14</i>	3.80	4.01	3.98
2	<i>Pertanyaan 15</i>	4.35	3.98	4.04
3	<i>Pertanyaan 16</i>	4.45	4.37	4.38
4	<i>Pertanyaan 17</i>	4.70	4.50	4.54
Total Skor		17.3	16.86	16.94
Mean Total Skor		4.33	4.22	4.24

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor gabungan 4.24, berarti bahwa kondisi struktur organisasi di BNP dan BNK/Kota dalam kondisi baik. Sebagian besar BNP dan BNK/Kota setuju kebijakan strategi nasional P4GN dijadikan pedoman tupoksi bagi BNP dan BNK/Kota dalam melaksanakan program P4GN di daerah.

Bila dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 45 ayat (1), yang berbunyi “dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka sudah tidak ada alasan lagi para Gubernur, Bupati/Walikota untuk tidak membentuk BNP dan BNK/Kota di daerahnya.

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/566/SJ tanggal 6 Maret 2008 perihal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana ditegaskan bahwa Kedudukan BNP dan BNK/Kota sebagai salah satu organisasi perangkat daerah. Mendagri menegaskan kepada kepala daerah di setiap provinsi untuk mendukung penuh

rencana BNN. Dalam surat keputusannya, Mendagri menyatakan BNP dan BNK/Kota adalah sebagai lembaga forum non struktural yang pembentukannya masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota. Selain itu pembentukan organisasi dan tata kerja pelaksana harian BNP dan BNK/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah.

Untuk mewujudkan kelembagaan BNP dan BNK/Kota perlu memperhatikan : 1) *Clear Concept*, perlu disusun suatu konsep yang jelas, dan komprehensif yang dapat menjawab semua permasalahan serta dapat dilaksanakan. 2) *Competent*, adanya dukungan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan mampu melaksanakan tugas dan perannya dalam mencapai visi dan misi organisasi. 3) *Connection*, adanya hubungan dan pola keterkaitan antar sub sistem maupun diluar sub sistem sehingga dapat mengefektifkan proses koordinasi dan pengambilan keputusan. 4) *Commitment*, perlu adanya tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas dan perannya secara efektif serta adanya konsistensi dalam pelaksanaannya.

Hal yang menjadi hambatan dalam variabel struktur birokrasi menurut hasil wawancara adalah hampir sebagian besar BNP dan BNK/Kota yang sudah terbentuk masih mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dan belum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Menurut responden, perpres no 83 Tahun 2007 masih belum tegas dan belum cukup kuat untuk dijadikan pegangan oleh BNP dan BNK/Kota. Terutama dalam hal status kelembagaannya yang masih bersifat non struktural dan bukan lembaga vertikal.

Sesuai pendapat Edward III, birokrasi merupakan hal sering dijumpai dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi tidak saja berada di badan-badan pemerintah namun juga berada dibawah organisasi swasta, birokrasi yang baik akan mendukung pencapaian tujuan organisasi, demikian sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor stuktur birokrasi di BNP dan BNK/Kota mendukung dalam suksesnya implementasi kebijakan stranas P4GN di BNP dan BNK/Kota.

5.2.4 Variabel Kecenderungan

Variabel kecenderungan dioperasionalkan dalam 4 (empat) pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil penghitungan mean skor variabel kecenderungan.

Tabel 5.64
Mean Total Skor Variabel Kecenderungan BNP dan BNK/Kota

No	Pertanyaan	MEAN		
		BNP	BNK/Kota	GABUNGAN
1	<i>Pertanyaan 18</i>	4.00	4.06	4.05
2	<i>Pertanyaan 19</i>	4.40	4.52	4.50
3	<i>Pertanyaan 20</i>	4.65	4.67	4.66
4	<i>Pertanyaan 21</i>	3.75	3.92	3.90
Total Skor		16.8	17.17	17.11
Mean Total Skor		4.2	4.29	4.28

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor gabungan 4.28, maka dapat dikatakan bahwa sikap responden terhadap implementasi kebijakan stranas P4GN di BNP dan BNK/Kota sangat positif.

Sikap dukungan komitmen dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota serta legislatif (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) sangat diperlukan dalam upaya melaksanakan program P4GN di BNP dan BNK/Kota. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pasal 13 ayat 1G (untuk tugas propinsi) dan pasal 14 ayat 1G (untuk kabupaten/kota) telah mengatur penanggulangan kewajiban pemerintah setiap daerah dalam penanganan narkoba, yang dalam peraturan tersebut masuk ke dalam masalah sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang baik dalam mendukung BNP dan BNK/Kota melaksanakan program P4GN di wilayah masing-masing, walaupun masih ada Pemda yang belum sepenuhnya memiliki komitmen untuk melaksanakan program P4GN di wilayahnya. Padahal penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bersifat multidimensional, tentunya harus mendapat dukungan dari para Gubernur, Bupati/Walikota dan dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan komitmen dan konsistensi dari segenap instansi pemerintah yang terkait, disertai dukungan dan partisipasi masyarakat.

Permasalahan narkoba yang semakin merajalela dari tahun ke tahun, akan menambah permasalahan baru jika tidak ditangani secara serius. Keseriusan harus dimulai dari kinerja aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Keterlibatan LSM, swasta, tokoh agama dan masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat membantu tugas-tugas pemerintah dan menguntungkan banyak pihak.

Organisasi sebaik apapun tidak akan dapat berfungsi dengan baik dan efektif apabila tidak didukung oleh komitmen pimpinan seperti Gubernur, Bupati atau Walikota. Demikian pula BNP dan BNK/Kota, tidak akan berjalan bila tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan telah terbitnya Perpres Nomor 83 tahun 2007 tentang BNN, BNP dan BNK/Kota, diharapkan daerah dapat segera menyesuaikan dan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor kecenderungan/sikap di BNP dan BNK/Kota sangat mendukung bagi suksesnya implementasi kebijakan stranas P4GN di BNP dan BNK/Kota.

5.2.5 Variabel Hubungan Antar Organisasi

Variabel hubungan antar organisasi dioperasionalkan dalam 4 (empat) pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil penghitungan mean skor variabel hubungan antar organisasi.

Tabel 5.65
Mean Total Skor Variabel Hubungan Antar Organisasi BNP dan BNK/Kota

No	Pertanyaan	MEAN		
		BNP	BNK/Kota	GABUNGAN
1	<i>Pertanyaan 22</i>	4.05	3.70	3.76
2	<i>Pertanyaan 23</i>	4.70	4.38	4.43
3	<i>Pertanyaan 24</i>	3.15	3.20	3.19
4	<i>Pertanyaan 25</i>	4.60	4.53	4.54
Total Skor		16.5	15.81	15.92
Mean Total Skor		4.13	3.95	3.98

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor gabungan 3.98, berarti bahwa hubungan antar organisasi BNP dan BNK/Kota dengan instansi lain dalam kondisi baik.

Pelaksanaan rapat koordinasi nasional antara BNN dengan BNP dan BNK/Kota diadakan untuk membangun kemitraan dan kesamaan pemahaman dalam pembentukan kelembagaan BNP dan BNK/Kota dalam rangka melaksanakan program P4GN. Melalui rapat koordinasi, BNN dapat mensosialisasikan program-program unggulan BNN dalam pelaksanaan P4GN yang nantinya dapat dijadikan pedoman bagi BNP dan BNK/Kota dalam rangka menyusun program kegiatan di daerah masing-masing dan juga untuk mempercepat terwujudnya pembentukan kelembagaan BNP dan BNK/Kota sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 selaras dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program P4GN di BNP dan BNK/Kota dalam kaitannya dengan upaya upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka optimalisasi koordinasi antar instansi terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba (seperti : BNN, BNP, BNK/Kota, Pemda, Kejaksaan, Polri dan instansi lainnya) merupakan prasyarat penting bagi pencapaian tujuan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tersebut. Koordinasi terpadu yang komprehensif dan integral yang melibatkan instansi terkait dalam hal ini BNN, BNP, BNK, Pemda, Kejaksaan, Polri, dan lapisan masyarakat seharusnya dilakukan sejak tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Sesuai pendapat Van Meter dan Van Horn, bahwa dalam banyak program, implementasi sebuah program diperlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Maka dapat diprediksikan bahwa faktor hubungan antar organisasi BNP dan BNK/Kota dengan instansi lain sudah mendukung suksesnya implementasi kebijakan stranas P4GN di BNP dan BNK/Kota.

5.2.6 Variabel Pelaksanaan Program

Variabel pelaksanaan program dioperasionalkan dalam 4 (empat) pertanyaan. Tabel berikut merupakan hasil penghitungan mean skor variabel pelaksanaan program.

Tabel 5.66
Mean Total Skor Variabel Pelaksanaan Program BNP dan BNK/Kota

No	Pertanyaan	MEAN		
		BNP	BNK/Kota	GABUNGAN
1	<i>Pertanyaan 26</i>	3.40	3.72	3.67
2	<i>Pertanyaan 27</i>	3.80	3.30	3.38
3	<i>Pertanyaan 28</i>	3.65	3.84	3.81
4	<i>Pertanyaan 29</i>	4.50	4.62	4.60
Total Skor		15.35	15.48	15.46
Mean Total Skor		3.84	3.87	3.87

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan nilai mean total skor gabungan 3.87, berarti bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Menurut wawancara dengan responden, banyak BNP dan BNK/Kota yang menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkobad di wilayah masing-masing walaupun masih ada beberapa BNP dan BNK/Kota yang melakukan kegiatannya yang bersifat seremonial saja seperti misalnya pada peringatan hari anti narkoba internasional (HANI) tanpa menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitator dan koordinator program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Akibatnya timbul ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja BNP dan BNK/Kota. Hal ini dikarenakan minimnya personil, kurangnya dukungan dana untuk melakukan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat maupun sarana prasarana yang belum mendukung.

Untuk itu diperlukan upaya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BNP dan BNK/Kota agar diketahui keberhasilan suatu program dan apakah program tersebut dapat dijalankan dengan baik walaupun dengan segala keterbatasan personil maupun anggaran. Disamping itu Pemerintah perlu membuat alat ukur

untuk mengukur keberhasilan BNP dan BNK/Kota dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan tabel diatas, faktor pelaksanaan program di BNP dan BNK/Kota mendukung suksesnya implementasi kebijakan stranas P4GN di BNP dan BNK/Kota.

5.3 Faktor- faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Stranas P4GN di BNP dan BNK/Kota

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota, dalam pengimplementasian kebijakan stranas P4GN tersebut terdapat beberapa faktor-faktor penghambat yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Komunikasi
 - a. Mekanisme pelaksanaan program P4GN di BNP dan BNK/Kota masih dirasakan kurang baik dalam pelaksanaannya.
 - b. Petunjuk pelaksanaan program P4GN yang telah dibuat BNN dirasakan masih kurang dalam penerapannya.
 - c. Masih adanya personil BNP dan BNK/Kota yang belum mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan program P4GN.
2. Faktor Sumber Daya
 - a. Faktor jumlah SDM di BNP dan BNK/Kota, dengan nilai mean gabungan sebesar 2.41, dapat disimpulkan dari pendapat responden baik di BNP maupun BNK/Kota bahwa ketersediaan jumlah SDM di BNP dan BNK/Kota masuk dalam kategori tidak baik/tidak memadai untuk melaksanakan program P4GN.
 - b. Faktor SDM di BNP dan BNK/Kota yang memenuhi kualifikasi untuk mengawaki BNP maupun BNK/Kota, dengan nilai mean gabungan sebesar 2.78, menunjukkan fakta bahwa standar kualifikas/kompetensi SDM di BNP dan BNK/Kota dapat dikategorikan tidak baik/tidak memenuhi standar untuk mengimplementasikan program P4GN.
 - c. Faktor SDM di BNP dan BNK/Kota yang mempunyai bekal pengetahuan dalam penanganan narkoba dan program P4GN, dengan nilai mean

gabungan sebesar 2.58, menurut pendapat responden bahwa pengetahuan SDM di BNP dan BNK/Kota dapat dimasukkan dalam kategori tidak memadai/kurang memenuhi.

- d. Dukungan dana/anggaran khusus untuk melaksanakan program P4GN, menurut responden di BNP dan BNK/Kota dengan nilai mean gabungan sebesar 2.07, dapat disimpulkan bahwa dukungan dana/anggaran dalam rangka melaksanakan program P4GN dapat dimasukkan dalam kategori tidak memadai. Pemda kurang mendukung BNP dan BNK/Kota
 - e. Sarana prasarana yang dimiliki BNP dan BNK/Kota, menurut responden dengan nilai mean gabungan sebesar 2.12, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana prasarana di BNP dan BNK/Kota untuk melaksanakan program P4GN dapat dimasukkan dalam kategori tidak memadai. Banyak BNP dan BNK/Kota yang belum memiliki kantor sekretariat tetap sendiri. Kebanyakan BNP dan BNK/Kota masih menumpang di kantor Pemda maupun Polda.
3. Faktor Struktur Birokrasi
- a. Kelembagaan BNP dan BNK/Kota masih banyak yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002.
 - b. BNP dan BNK/Kota menilai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 belum tegas. Terutama dalam hal status kelembagaan yang masih bersifat non-struktural dan juga bukan lembaga vertikal. Dalam hal pendanaan kegiatan operasional di BNP dan BNK/Kota dibebankan ke APBD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.
 - c. Payung hukum dalam bentuk peraturan daerah belum ada sehingga ada peluang penolakan dari DPRD jika anggaran operasional BNP dan BNK/Kota diusulkan dalam APBD karena pembentukan struktur kelembagaan BNP maupun BNK/Kota hanya didasarkan pada peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.
 - d. BNN tidak dapat melaksanakan fungsi komando kepada BNP dan BNK/Kota karena tidak adanya hubungan secara struktural dan secara finansial BNP dan BNK/Kota tidak tergantung dari pusat. Dengan demikian BNN sebagai badan yang menangani pencegahan dan

pemberantasan narkoba di tingkat pusat tidak dapat mengintervensi kegiatan-kegiatan BNP dan BNK/Kota.

4. Faktor Kecenderungan/Sikap

- a. Masih rendahnya dukungan komitmen politis dan operasional Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan program P4GN di wilayahnya masing-masing.
- b. Peran Pemerintah Daerah belum optimal dalam melaksanakan program P4GN di wilayah masing-masing.

5. Faktor Hubungan Antar Organisasi

Hubungan koordinasi instansi Polri dan Pemda masih kurang solid.

6. Faktor Pelaksanaan Program

Beberapa BNP dan BNK/Kota hanya melakukan kegiatan ketika menjelang peringatan hari anti narkoba internasional (HANI) tanpa menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitator dan koordinator program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.